

Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Tata Kelola Lokal dari Perspektif dari Organisasi Masyarakat

Increasing Community Involvement in Local Governance from the Perspective of Community Organizations

Gazali ^{1*}

Muhammad Alias ²

¹Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Indonesia Timur,
Makassar

²Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Indonesia Timur,
Makassar

email: gazali@uit.ac.id

Kata Kunci

Motivasi Kerja
Pelayanan Publik
Aktualisasi Diri

Keywords:

Work Motivation
Public Service
Self-Actualization

Received: Juli 2024

Accepted: Juli 2024

Published: Juli 2024

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung tugas lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Manggala, Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa lembaga seperti RT, RW, LPMK, PKK, dan Karang Taruna berperan strategis dalam mediasi sosial, aspirasi kebutuhan masyarakat, dan implementasi kebijakan. Namun, keterbatasan pendanaan, keanggotaan tidak aktif, dan ketidakmerataan pembinaan menjadi hambatan utama yang mempengaruhi kinerja mereka. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya strategi pengelolaan yang lebih efektif dan konsisten dalam pembinaan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan lokal.

Abstract

This research explores the role of community institutions in supporting the village head's duties in the field of development in Manggala Village, Makassar City. The research method uses a phenomenological approach through in-depth interviews and document analysis. The findings show that institutions such as RT, RW, LPMK, PKK, and Karang Taruna play a strategic role in social mediation, aspirations for community needs, and policy implementation. However, limited funding, inactive membership, and uneven development are the main obstacles that affect their performance. The recommendations of this research include the need for more effective and consistent management strategies in coaching to increase the role of community institutions in local development



© Year Author(s). Published by Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur
<https://jurnal.uit.ac.id/IPE>. This is Open Access article under the Creative Commons Attribution 4.0
International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) DOI: <https://doi.org/10.30690>

PENDAHULUAN

Dewasa ini, tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat kelurahan, semakin bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tuntutan zaman untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan (Ishak, 2022). Sebagai alternatif untuk meringankan beban tugas tersebut, lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan atau desa dianggap sebagai solusi yang efektif. Lembaga kemasyarakatan ini membantu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. (Afrianedi, 2020; Lubis & Islami, 2022)

Dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, lembaga kemasyarakatan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Pembentukan lembaga ini dilakukan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat (Fratama, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa di setiap kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berperan membantu lurah dalam urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 mengatur fungsi lembaga ini, termasuk sebagai wadah aspirasi masyarakat, pemupukan persatuan, peningkatan pelayanan pemerintah, serta pengembangan partisipatif pembangunan. (Lakhizha, 2022; Wang et al., 2022)

Dengan keberadaannya yang diakui secara formal, lembaga kemasyarakatan memegang peran penting dalam mendukung tugas pemerintahan di tingkat kelurahan, khususnya dalam konteks Kota Makassar, Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun belum ada peraturan daerah yang mengaturnya, lembaga ini telah lama beroperasi dengan berbagai kegiatan yang mendukung pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Manggala, Makassar. (Risfaisal et al., 2023)

Penelitian ini tertarik untuk menginvestigasi realisasi tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di Kota Makassar, mengingat kota ini belum memiliki peraturan daerah khusus mengenai lembaga tersebut, berbeda dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Fokusnya terutama pada peran serta dan kendala yang dihadapi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan di Kelurahan Manggala.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi subjektif dari para anggota lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Manggala, Kota Makassar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana para anggota lembaga mengartikan dan menjalankan peran mereka dalam mendukung pemerintahan lokal dan pembangunan masyarakat, tanpa terikat pada struktur atau teori tertentu. Melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam pengalaman praktis sehari-hari mereka, serta mengidentifikasi tantangan dan kesempatan yang mereka hadapi dalam konteks yang belum memiliki regulasi lokal yang khusus mengatur lembaga kemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa lembaga kemasyarakatan di Kelurahan memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas lurah. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (LPMK), PKK, Karang Taruna, dan lainnya dianggap sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi administratif dan sosial kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Mereka berperan dalam memfasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Selain sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, lembaga kemasyarakatan juga memainkan peran ganda sebagai mediator sosial, aspirator kebutuhan masyarakat, serta eksekutor kebijakan untuk memastikan implementasi yang efektif. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan publik dengan kebutuhan riil masyarakat, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan, serta memperkuat kohesi sosial dan integrasi komunitas lokal.

Kehadiran lembaga kemasyarakatan di Kelurahan tidak hanya mengisi kekosongan administratif, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur secara rinci tentang lembaga kemasyarakatan di Kota Makassar, keberadaan mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelancaran tugas pemerintahan kelurahan.

Penelitian ini juga menyoroti perlunya pengakuan lebih lanjut dan dukungan kelembagaan terhadap peran lembaga kemasyarakatan dalam konteks perkembangan urban dan tuntutan zaman yang semakin meningkat. Dengan menggali lebih dalam peran serta dan kontribusi nyata lembaga kemasyarakatan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana lembaga ini dapat terus dikembangkan sebagai elemen penting dalam mendukung pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat di Kota Makassar, Provinsi Kepulauan Riau.

faktor internal dan eksternal yang menghambat lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Manggala, Kota Makassar:

Faktor internal yang mempengaruhi peranan lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembangunan termasuk pendanaan dan keanggotaan. Keterbatasan pendanaan sering menjadi penghalang utama bagi eksistensi dan operasional lembaga ini. Keanggotaan yang tidak aktif juga menurunkan efektivitas pengurus dalam menjalankan fungsi organisasionalnya. Ketidakaktifan anggota sering kali disebabkan oleh beban kerja dan tanggung jawab keluarga, mengurangi partisipasi mereka dalam aktivitas lembaga.

Tabel 1. Potensi Internal Penghambat kerjasama

No.	Kategori Faktor Internal	Deskripsi Temuan
1	Kurangnya Koordinasi Internal	Terdapat kurangnya koordinasi antara unit-unit dalam lembaga, menyebabkan tumpang tindih tugas.

No.	Kategori Faktor Internal	Deskripsi Temuan
2	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Staf yang terbatas menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat secara efektif.
3	Infrastruktur yang Tidak Memadai	Kondisi bangunan dan fasilitas tidak memadai menghambat operasional harian dan pelayanan publik.
4	Kurangnya Pengetahuan Teknis	Kelebihan birokrasi karena kurangnya pengetahuan teknis dalam menanggapi perubahan kebijakan.
5	Ketidakmampuan dalam Pengambilan Keputusan	Proses pengambilan keputusan yang lambat menghambat responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
6	Kurangnya Keterbukaan dan Transparansi	Kurangnya keterbukaan dalam proses pengelolaan anggaran dan kebijakan pembangunan.
7	Kultur Organisasi yang Tidak Mendukung	Budaya kerja yang resisten terhadap perubahan menghambat inovasi dalam pelayanan publik.
8	Kurangnya Komitmen Pemimpin	Kurangnya komitmen dari pimpinan dalam memotivasi staf dan mendukung inisiatif perubahan.

Sumber, hasil Penleitian, 2024

faktor internal yang berpotensi menghambat lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Manggala, Kota Makassar:

Pertama, kurangnya koordinasi internal menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Manggala. Terdapat kecenderungan untuk terjadinya tumpang tindih dalam penugasan dan kurangnya sinergi antar unit-unit dalam lembaga. Hal ini menghambat efisiensi operasional dan memperlambat respon terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Misalnya, kebijakan pembangunan sering kali tidak tersinkronisasi dengan program sosial yang ada, menyebabkan pemborosan sumber daya dan waktu.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi permasalahan signifikan. Jumlah staf yang terbatas sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan layanan masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pelayanan publik yang tidak optimal dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Contohnya, layanan administrasi terkendala karena kurangnya tenaga ahli dalam mengelola proses pendaftaran program pembangunan di tingkat lokal.

Ketiga, infrastruktur yang tidak memadai turut menghambat kinerja lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Manggala. Bangunan kantor yang tua dan fasilitas yang minim sering kali tidak mampu menopang kegiatan harian dengan baik. Misalnya, ketersediaan ruang pertemuan yang terbatas sering kali menghambat koordinasi antar unit atau dengan pihak luar seperti kelompok masyarakat atau instansi pemerintah lainnya. (. et al., 2023)

Keempat, budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi dan perubahan menjadi faktor internal lainnya yang perlu diperhatikan. Adanya resistensi terhadap perubahan dan kurangnya dukungan untuk ide-ide baru menghambat kemampuan lembaga untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan

masyarakat. Contoh konkretnya adalah sulitnya mengimplementasikan kebijakan baru yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik karena keengganan untuk mengubah pola kerja yang telah mapan. (. et al., 2024)

Untuk menganalisis faktor internal yang menghambat lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Manggala, Makassar, dapat digunakan teori analisis lingkungan internal organisasi. Teori ini mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang mempengaruhi kinerja dan adaptabilitas suatu organisasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan internalnya. (. et al., 2023)

Pertama, dari sudut pandang teori struktural, faktor seperti kurangnya koordinasi internal dan keterbatasan sumber daya manusia mencerminkan struktur organisasi yang mungkin belum optimal dalam mendukung efisiensi dan efektivitas. Struktur yang kurang fleksibel dan terlalu tersegmentasi dapat menghambat aliran informasi dan koordinasi antar unit, yang pada gilirannya mengurangi responsivitas terhadap perubahan dalam kebutuhan masyarakat. (Afrianedi, 2020)

Kedua, teori sumber daya organisasi menyoroti pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Infrastruktur yang tidak memadai dan keterbatasan staf menunjukkan bahwa sumber daya organisasi belum dioptimalkan dengan baik untuk mendukung kegiatan operasional yang efektif. Perencanaan yang lebih baik dalam alokasi sumber daya dan investasi dalam peningkatan infrastruktur dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini. (Madjidu et al., 2022)

Ketiga, dari perspektif budaya organisasi, teori ini menekankan pentingnya budaya yang mendukung inovasi dan adaptabilitas. Tantangan dalam mengubah budaya kerja yang resisten terhadap perubahan menunjukkan perlunya strategi untuk membangun komitmen kolektif terhadap perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik. Mengidentifikasi nilai-nilai yang mendorong resistensi dan merancang program pelatihan serta komunikasi yang tepat dapat membantu memperbaiki budaya organisasi yang lebih responsif dan inovatif. (Wibowo, 2022)

Pembinaan yang tidak merata menjadi tantangan signifikan bagi lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Manggala. Meskipun konsep pembinaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, penerapan yang tidak konsisten mengakibatkan beberapa lembaga menerima pembinaan dengan baik sementara yang lain tidak. Kesenjangan ini dapat menghambat aktivitas dan eksistensi lembaga, karena kurangnya bimbingan dan dukungan menyebabkan mereka kesulitan dalam menjalankan fungsi sosial dan pembangunan di tingkat lokal.

Tabel 2. Faktor eksternal yang berpotensi menghambat lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah di bidang pembangunan

No.	Kategori Faktor Eksternal	Deskripsi Temuan
1	Keterbatasan Anggaran	Anggaran yang terbatas menghambat implementasi proyek pembangunan yang direncanakan.
2	Ketidakpastian Kebijakan Pemerintah	Perubahan kebijakan pemerintah yang sering terjadi menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan proyek.
3	Kurangnya Infrastruktur Pendukung	Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih memperlambat progres pembangunan.
4	Perubahan Kondisi Ekonomi Lokal	Fluktuasi ekonomi yang tidak terduga mempengaruhi ketersediaan dana untuk pembangunan lokal.
5	Tekanan dari Pihak Eksternal (Misal: Pengembang)	Tekanan dari pengembang properti untuk mempengaruhi rencana pembangunan yang ada di kelurahan.
6	Konflik Sosial Antara Warga	Konflik sosial seperti perselisihan tanah atau kepentingan dapat mengganggu pelaksanaan proyek pembangunan.
7	Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah	Perubahan dalam kewenangan dan kebijakan otonomi daerah dapat mempengaruhi alokasi sumber daya lokal.
8	Perubahan Kebijakan Pusat	Kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan kebutuhan lokal dapat menyulitkan implementasi program pembangunan.

Sumber, Hasil Penelitian, 2024

Kelurahan Manggala, sebagai bagian dari Kota Makassar, menghadapi sejumlah tantangan eksternal yang signifikan dalam upaya mereka untuk melakukan pembangunan lokal. Pertama-tama, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam merealisasikan proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan. Dengan anggaran yang terbatas, kelurahan sering kali harus memprioritaskan proyek-proyek yang paling mendesak atau mencari alternatif pembiayaan dari sumber-sumber eksternal. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk merespons dengan cepat terhadap kebutuhan infrastruktur dan sosial yang mendesak di komunitas mereka.

Ketidakpastian kebijakan pemerintah juga menjadi masalah serius. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat mengganggu perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Misalnya, perubahan regulasi terkait izin atau persyaratan teknis dapat memperlambat atau bahkan menghentikan sementara proyek yang sedang berjalan, mengakibatkan ketidakpastian bagi warga dan pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

Kurangnya infrastruktur pendukung seperti jalan, saluran air bersih, dan listrik yang memadai juga menjadi kendala yang nyata. Infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat aksesibilitas dan kualitas hidup warga, serta memperlambat kemajuan proyek-proyek pembangunan yang bergantung pada infrastruktur dasar yang memadai.

Perubahan kondisi ekonomi lokal juga memiliki dampak yang signifikan. Fluktuasi ekonomi yang tidak terduga dapat mengurangi ketersediaan dana untuk pembangunan lokal, baik dari sumber-sumber internal maupun eksternal. Hal ini membuat kelurahan kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek yang memerlukan investasi besar atau pembiayaan jangka panjang.

Tekanan dari pihak eksternal, seperti pengembang properti, juga dapat mempengaruhi rencana pembangunan yang ada di kelurahan. Tekanan ini sering kali berasal dari kepentingan bisnis yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat luas atau kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini memerlukan koordinasi dan negosiasi yang cermat antara lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak eksternal untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Konflik sosial antara warga juga dapat menjadi hambatan serius. Perselisihan terkait kepemilikan tanah, kepentingan ekonomi, atau perbedaan budaya dapat mengganggu pelaksanaan proyek pembangunan yang direncanakan. Konflik ini membutuhkan pendekatan mediasi yang efektif dan solusi yang inklusif untuk mencapai konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Selain itu, perubahan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan pusat juga dapat berdampak signifikan. Perubahan dalam kewenangan dan kebijakan otonomi daerah dapat mengubah dinamika pembangunan lokal, sementara kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan kebutuhan atau prioritas lokal dapat menghambat implementasi program pembangunan yang efektif.

Analisis teori lingkungan eksternal organisasi dapat memberikan wawasan yang dalam terkait dengan faktor-faktor eksternal yang menghambat lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Manggala, Kota Makassar dalam membantu tugas lurah di bidang pembangunan. Teori ini menekankan bahwa lingkungan eksternal sebuah organisasi, dalam konteks ini lembaga kemasyarakatan, terdiri dari faktor-faktor yang berada di luar kendali langsung organisasi tetapi memiliki dampak signifikan terhadap operasional dan keberhasilan strategisnya.

Pertama, keterbatasan anggaran dapat dilihat sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang menentukan. Lingkungan ekonomi yang tidak stabil atau pengaturan keuangan publik yang tidak memadai dapat membatasi sumber daya yang tersedia untuk proyek-proyek pembangunan. Ini sesuai dengan teori bahwa organisasi harus mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan finansial yang berubah-ubah untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya.

Kedua, ketidakpastian kebijakan pemerintah dan perubahan regulasi mencerminkan dinamika politik dalam lingkungan eksternal. Teori ini menunjukkan bahwa organisasi harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi, serta membangun

hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung tujuan pembangunan mereka.

Ketiga, kurangnya infrastruktur pendukung dan perubahan kondisi ekonomi lokal mencerminkan aspek fisik dan ekonomi dari lingkungan organisasi. Teori lingkungan eksternal menyarankan bahwa organisasi harus dapat bekerja sama dengan pemerintah lokal, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun infrastruktur yang diperlukan dan menyesuaikan strategi pembangunan dengan kondisi ekonomi lokal yang berubah.

Keempat, tekanan dari pihak eksternal seperti pengembang properti menyoroti pentingnya memahami kepentingan dan motivasi pihak-pihak eksternal yang berinteraksi dengan organisasi. Teori ini mendorong organisasi untuk melakukan analisis stakeholder yang mendalam dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Manggala, Kota Makassar memiliki peran vital dalam mendukung tugas-tugas lurah. Mereka tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah tetapi juga sebagai mediator sosial, aspirator kebutuhan masyarakat, dan eksekutor kebijakan untuk memastikan implementasi yang efektif. Meskipun pentingnya peran mereka diakui dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, lembaga kemasyarakatan dihadapkan pada tantangan internal seperti keterbatasan pendanaan dan ketidakaktifan anggota. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakmerataan dalam pembinaan dari pemerintah daerah juga menjadi hambatan signifikan. Untuk memperkuat kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan lokal, pengakuan lebih lanjut terhadap peran serta lembaga kemasyarakatan serta dukungan kelembagaan yang lebih besar sangat diperlukan.

Saran

Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk mendalami lebih dalam mengenai strategi peningkatan partisipasi anggota lembaga kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan di tingkat kelurahan. Fokus penelitian dapat difokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi anggota, baik melalui insentif non-finansial maupun pengembangan program pelatihan dan pendampingan yang lebih efektif. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang implementasi pembinaan yang konsisten dan merata bagi semua lembaga kemasyarakatan, sehingga dapat mendukung mereka secara lebih optimal dalam melaksanakan peran dan fungsi sosialnya. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan dapat

memberikan wawasan mendalam dan rekomendasi konkret untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan lokal di Kota Makassar dan konteks serupa lainnya.

REFERENSI

- . D., Harlinda Nurdin, N., & Adia Purna, Z. (2023). Unleashing the Power of Capacity Building: Transforming Governance and Policy Implementation in the Digital Era. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14121>
- . S., Sakawati, H., Nur Yamin, M., Adia Purna, Z., & . W. (2024). Community-based Agrotourism Development: The Analysis Strategy of Government of Bantaeng Regency, Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14856>
- Afriani, R. (2020). Dinamika Birokrasi Indonesia Dan Sistem Pengawasan Untuk Mewujudkan Good Governance. *Pengadilan Agama Cilegon*, 2024.
- Fratama, A. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 9 (1)(1).
- Ishak, D. (2022). Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1). <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.4>
- Lakhizha, M. I. (2022). PROBLEMS OF PUBLIC SERVICES AND COMMUNICATIONS IN POLISH HISTORIOGRAPHY. *State Formation*, 1. <https://doi.org/10.26565/1992-2337-2022-1-08>
- Lubis, L. A., & Islami, N. (2022). Kepemimpinan dalam Manajemen Perubahan di Lingkungan Organisasi Bisnis. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1).
- Madjidu, A., Usu, I., & Yakup, Y. (2022). ANALISIS LINGKUNGAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN SEMANGAT KERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.598>
- Risfaisal, Nawir, M., Azis, F., Kaharuddin, Sari, N., & Abdussalam. (2023). Sosialisasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Desa Berbasis Lokalitas Adat Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(3).
- Wang, Y., Qi, Y., & Chen, G. (2022). Participatory governance and local government responsiveness: evidence from participation in politics on television in China. *Local Government Studies*, 48(5). <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.2009805>
- Wibowo, F. A. (2022). Analisis Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS DIGITAL (EKOBIL)*, 1(1). <https://doi.org/10.58765/ekobil.v1i1.24>